

DILEMA PENGANGGURAN : SALAH SATU STRATEGI ALTERNATIF JALAN KELUARNYA (Deskripsi Angka Pengangguran Kota Malang)

Moh. Munir

Abstrak: sebagai keadaan yang mengejala dan selalu dihadapi oleh semua negara terutama negara sedang berkembang adalah masalah pengangguran. Pengangguran sebagai kondisi yang harus kita hadapi bagi setiap bangsa. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran diantaranya karena rendahnya SDM yang ada, kesenjangan antara jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Keadaan ini terutama dialami oleh sebagian besar kota-kota besar di Indonesia tidak terkecuali di Kota Malang. Dikota terbesar nomor 3 di Indonesia ini juga terdapat angka pengangguran yang cukup seerius. Terutama pada komposisi pendidikan SLTA dan pendidikan tinggi. Berbagai kebijakan bisa ditempuh guna mengatasi pengangguran yaitu (1) Reformasi dibidang pelatihan dan peningkatan relevansi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan kualitas pelatihan dan peningkatan efisiensi pelatihan, (2) Pemanfaatan dan kerjasama program wirausaha baru bagi mahasiswa tingkat akhir dengan melibatkan instansi / perusahaan yang memerlukan dengan didahului identifikasi kebutuhan stakeholders.

Kata kunci : Dilema pengangguran , jalan keluarnya

PENDAHULUAN

Sebelum berbicara masalah pengangguran, pengakajian kita diawali dengan peranan penduduk sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal ini jumlah penduduk yang sangat besar merupakan modal utama dalam proses pembangunan, karena penduduk merupakan obyek dan sekaligus subyek penting dalam pembangunan. Di satu pihak, peranan penduduk yang sangat besar selain sebagai modal dasar dalam pembangunan, karena sebagai pasar potensial yang akan menyerap output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan proses produksi sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional. Namun disisi yang lain, jumlah penduduk yang sangat besar bisa menjadi beban dalam pembangunan dan dapat menimbulkan problem dalam segala aspeknya. Dengan demikian kapan jumlah penduduk sebagai modal dasar atau beban dalam pembangunan terletak pada kualitas dari penduduk itu sendiri, buka pada kuantitasnya.

Diantara sekian banyak permasalahan yang ditimbulkan akibat pesatnya jumlah penduduk adalah ketidak seimbangan antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan semakin bertambahnya tenaga kerja setiap tahunnya. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja daripada permintaan, sehingga memunculkan fenomena pengangguran.

Selain diatas terdapat juga berbagai sebab non ekonomis, seperti pranata sosial sikap dan pola tingkah laku yang berhubungan dengan pengamatan hak kerja, serta

Moh. Munir adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang

keinginan para penganggur untuk menerima jenis pekerjaan yang lebih cocok dengan kualifikasi, aspirasi dan selera mereka (Munir dan Budiarto, 1985:141).

Pengangguran sebagai masalah klasik yang selalu dihadapi oleh setiap negara baik oleh negara maju sekalipun, apalagi bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Pengangguran di Indonesia sebagaimana negara-negara berkembang yang lain merupakan masalah pokok dalam kegiatan pembangunan. Sehingga isu-isu tentang pemecahan masalah pembangunan terutama pembangunan ekonomi yang terkait dengan pengangguran sering menjadi komoditi politik yang dipakai sebagai ujung tombak untuk memenangkan percaturan pertarungan politik tertentu, terutama pada saat terjadinya pemilihan umum. Bahkan dinegara maju seperti Amerika kerberhasilan Presiden Amerika saat ini karena masyarakat percaya bahwa dengan kepemimpinannya nanti Amerika bisa mengurangi angka pengangguran.

Pengangguran sebagai suatu masalah tentunya bukan hanya tugas pemerintah untuk mengatasinya, melainkan menjadi kewajiban kita bersama sebagai warga yang ikut memiliki negeri ini. Khususnya di Kota Malang sebagai kota besar no 3 di Indonesia setelah Kota Surabaya, tentunya masalah pengangguran merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi. Dalam kesempatan ini sengaja dibahas masalah pengangguran Kota Malang dalam perspektif disertai dengan solusi kebijakan yang harus dan perlu ditempuh, yang ditunjang dengan berbagai data sekunder dari dinas terkait. Lewat kesempatan ini pula penulis mecoba ikut memberikan sumbangan pikiran yang berarti bagi pemecahan dari sekian banyak masalah bangsa yang khususnya masalah pengangguran.

KAJIAN PUSTAKA

Identifikasi Umum Tentang Pengangguran

Dari berbagai permasalahan yang timbul kepermukaan sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan penduduk adalah ketidak seimbangan antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan semakin bertambahnya tenaga kerja setiap tahunnya. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja dari pada permintaannya, sehingga memunculkan fenomena pengangguran. Di satu sisi pengangguran menunjukkan adanya suatu selisih antara jumlah permintaan (deman for labor) dan penawaran tenaga kerja (suplay of labor) dalam suatu perekonomian. Selain itu terdapat pula sebab-sebab diluar ekonomis seperti pranata, sikap dan pola tingkah laku yang berhubungan dengan pengamanan hak kerja , serta keinginan kaum penganggur untuk menerima jenis pekerjaan yang lebih cocok dengan kualifikasi, aspirasi atau selera mereka (Munir dan Budiarto, 1985:141).

Identifikasi dan pengukuran bentuk pengangguran yang tepat menjadi hal penting untuk diketahui sebab dan cara pemecahannya. Diantara kategori utama pengangguran secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut : (Simanjuntak, 1998:14-15). Adalah sebagai berikut :

- Pengangguran yang bergeser (frictional unemployment), merupakan akibat berpindahnya dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Sehingga terdapat tenggang waktu dan membuat seseorang berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lainnya.
- Pengangguran musiman (seasional unemployment), yakni menganggur sementara diakibatkan oleh pergantian musim panen dan musim tanam.
- Pengangguran struktural (struktural unemployment), yakni menganggur karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi dalam perekonomian.
- Pengangguran yang diakibatkan oleh kelebihan yang kronis dari total penawaran dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja.

Disisi lain masalah pengangguran terbuka dan setengah pengangguran merupakan refleksi dari kemiskinan dan rendahnya produktivitas penduduknya, meskipun golongan yang disebut terakhir juga melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi / bekerja demi menjaga gengsi. Pada mulanya mereka melakukan kegiatan tersebut hanya untuk sekedar mempertahankan hidup atau status sosial bila tidak ingin

dikatakan sebagai penganggur. Namun sebagian dari mereka ada yang meneruskan kegiatan ini secara sukarela, bahkan tidak jarang dari mereka ada yang melakukan secara terpaksa. Menurut Todaro (2000:270), mereka inilah yang terjaring dalam golongan setengah pengangguran (*under unemployment*). Golongan ini kemudian terbagi atas beberapa jenis sebagai berikut :

- Setengah penganggur tidak kentara (*invisible unemployment*) yaitu mereka bekerja memenuhi jam kerja normal, namun berada pada jabatan / posisi yang sebetulnya membutuhkan kualifikasi / kapasitas di bawah yang ia miliki.
- Setengah penganggur kentara (*visible underemployment*), mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja dibawah jumlah jam kerja normal (35 jam perminggu).
- Setengan pengangguran potensial (*potential underemployment*) yaitu mereka yang bekerja memenuhi jam kerja normal dengan kapasitas jam kerja normal, namun organisasi, teknis dan keterbatasan lain ditempat ia bekerja.

Disamping itu komposisi umur dan jenis kelamin angkatan kerja juga dapat membawa akibat terhadap angka pengangguran. Secara demografis, semakin besar keikutsertaan kaum wanita dalam angkatan kerja, maka tingkat pengangguran tersebut semakin berkurang. Sedangkan struktur umur muda terutama dinegara berkembang, justru sering didominasi oleh golongan umur produktif yang belum memperoleh pekerjaan. Hal inilah yang menyebabkan tingginya angka pengangguran bila dikaitkan dengan kedua hal tersebut.

Gambaran Angka Pengangguran di Indonesia

Dari data yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tercatat jumlah pengangguran saat ini mencapai 40 juta jiwa yang dapat dipilih menjadi 9,1 juta pengangguran penuh/terbuka dan 31,9 juta setengah pengangguran (kompas,2003). Padahal sepanjang tahun 2004 perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 3,8-3,9 persen (Kompas,2004). Bila asumsi pertumbuhan 1 persen mampu menyerap 400.000 pekerja disektor manufaktur, maka angkatan kerja yang mampu diserap dalam perekonomian sebanyak 1,5 hingga 2 juta orang. Angka ini bahkan belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang diperkirakan 2,5 juta orang. Artinya penyerapan angkatan kerja tersebut tidak mampu mengurangi pertumbuhan pengangguran (Kompas,2003). Menurut Mar'I Muhammad, guna menampung 2,5 juta orang setiap tahun yang membutuhkan pekerjaan, idealnya perekonomian harus tumbuh sebesar 7 persen. Bahkan bila ingin aman pertumbuhan itu harus mencapai 8 persen, karena bukan tidak mungkin banyak investor yang lebih memilih padat modal (*labor saving*) daripada padat karya (Koran Tempo,2003).

Selanjutnya pada tahun 2001 jumlah pengangguran terbuka sebesar 8 juta atau 8,1 % dari total angkatan kerja yang ada. Menginjak pada tahun 2003 angka pengangguran bertambah banyak, karena pada tahun tersebut terjadi putus hubungan kerja (PHK) diberbagai daerah di Indonesia. Lihat saja kasus henggangnya PT. SONY Corp dari Indonesia yang menyebabkan hilangnya nafkah ribuan kepala keluarga didaerah Jabotabek. Kemudian disusul dengan terjadinya PHK di PT Dirgantara Indonesia sekitar 2.517 karyawan, dan Exxon Mobil memberhentikan lebih kurang 1.000 karyawan. Demikian pula dengan pabrik sepatu merk Nike dan beberapa pabrik skala menengah di Sidoarjo banyak yang terseret PHK lantaran mereka berjuang menaikkan tingkat kesejahteraan. Namun demikian dapat dimaklumi bahwa pekerja/buruh didaerah tersebut menuntut upah yang sama dengan pekerja di Kota Surabaya, walaupun tingkat kebutuhan hidup di Kabupaten Sidoarjo berbeda dengan Kota Surabaya (Kompas,2003).

Dalam konteks ini sebenarnya upah buruh relatif tidak tergantung kepada tingkat profit yang diperoleh suatu perusahaan. Karena kenyataannya bila tiba-tiba bila suatu perusahaan memperoleh laba yang meningkat drastis, maka dapat dipastikan seluruh peningkatan laba itu akan jatuh ketangan pemilik modal, dan jarang bisa dinikmati oleh karyawan. Akan tetapi sebaliknya bila suatu perusahaan jatuh bangkrut, maka pemilik modal tidak memperoleh keuntungan, namun dapat dipastikan pekerja

akan diistirahatkan (Yustika,2003). Sementara itu data dari Ditjen Binawas-Disnekrtrans memetakan bahwa wilayah yang rawan terjadinya pemogokan buruh memang lokasinya tidak jauh dari pusat pemerintahan dan kegiatan perekonomian yang memang didominasi oleh profinsi-profinsi di Pulau Jawa, kecuali daerah Istimewa Yogyakarta.

Disisi lain sebenarnya pada saat krisis berlangsung pola pengangguran terbuka di Indonesia tidak mengalami perubahan, yaitu didaerah perkotaan lebih tinggi dari pada daerah pedesaan. Namun patut disimak bahwa kenaikan angka pengangguran terbuka di daerah perkotaan ternyata cukup kecil bila dibanding dengan daerah pedesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun telah terjadi krisis ekonomi, yang dicirikan dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), namun hal tersebut tidak menyebabkan angka pengangguran terbuka meningkat tajam. Tampaknya fenomena ini diperkuat dengan hasil penelitian Bairoch (1985:61) bahwa pengangguran terbuka dinegara-negara berkembang lebih didominasi di wilayah perkotaan dari pada di pedesaan. Menurut BPS angka pengangguran diperkotaan tercatat 6,1 % pada tahun 1990 dan meningkat menjadi 6,4 % pada tahun 2000. Akan tetapi patut disimak bahwa pada tahun 2000 akibat adanya dampak krisis angka pengangguran terbuka mengalami kenaikan cukup berarti di pedesaan dari 2 % (1990) menjadi 4,1 % (2000).

Berikutnya data pengangguran bila dilihat dari komposisi tingkat pendidikan selama dekade dua puluh tahun terakhir meningkat dengan tajam. Indikasi tersebut terjadi pada angkatan kerja berpendidikan terutama perempuan, baik pada tahun 1990 maupun tahun 2000. Dari data yang ada baik didaerah perkotaan maupun daerah pedesaan angka pengangguran terbuka cukup menonjol pada perempuan yang berpendidikan SLTA dan Universitas. Untuk SLTA dan Universitas angka pengangguran terbuka pada angkatan kerja perempuan, baik didaerah perkotaan maupun dipedesaan besarnya diatas 10 % (Efendi,2003).

Gejala tersebut diatas menunjukkan bahwa angkatan kerja perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin angkatan kerja perempuan yang berpendidikan bersedia nganggur untuk memperoleh pekerjaan yang lebih mapan. Namun seperti diketahui bahwa peluang yang mereka harapkan hanya terdapat pada instansi atau perusahaan yang sangat selektif dalam jumlah maupun kualitas. Apalagi kalau dikaitkan dengan rasio sarjana S1 di Indonesia, dari 100 laki-laki berbanding 61 sarjana perempuan (sakernas,2003). Bahkan dipropinsi Jawa Timur misalnya, rasio tersebut menunjukkan perbandingan 145 untuk sarjana laki-laki dan 100 sarjana perempuan (Syafi'I,2003).

Data tersebut juga semakin membuka cakrawala bahwa pengangguran terbuka tampaknya lebih berkaitan dengan perluasan pendidikan yang selama dua dekade meningkat dengan tajam. Ada benarnya bahwa pengangguran terbuka terjadi pada angkatan kerja yang berpendidikan, khususnya para perempuan dalam tahun 1990 dan tahun 2000. Menurut Suryadi gejala itu terjadi sebagai akibat dari ketimpangan antara struktur kesempatan kerja dan struktur angkatan kerja menurut pendidikan. Dengan demikian disatu sisi sistem pendidikan telah menghasilkan lulusan dalam jumlah yang besar dengan pendidikan yang tinggi, namun disisi lain struktur ekonomi masih didominasi oleh kegiatan ekonomi tradisional yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja berpendidikan rendah, atau bahkan tidak berpendidikan.

Tentunya terdapat pandangan yang tidak boleh dianggap sepele bahwa orientasi lulusan perguruan tinggi seharusnya diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai atau siap kerja dan bukan siap latih, atau hanya diarahkan pada manusia dewasa siap berfikir. Namun pendapat tersebut banyak ditentang oleh berbagai kalangan, sebagian berpendapat bahwa lulusan pendidikan tinggi pada dasarnya tidak harus siap kerja, dalam arti harus menguasai ketrampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja, melainkan lebih pada kedewasaan berfikir. Tampaknya pendapat terakhir ini lebih mendewasakan orang menjadi manusia, karena perguruan tinggi tidak hanya mempersiapkan mahasiswa untuk mencari pekerjaan. Dan harus diakui pandangan terakhir inilah yang banyak diterima oleh mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan dilingkungan perguruan tinggi.

Pada bagian lain terdapat pula pertanyaan yang mengusik pikiran, mengapa pengangguran terbuka, khususnya yang terjadi diperkotaan, tidak mengalami perubahan yang berarti akibat adanya krisis pada tahun-tahun sebelumnya. Barangkali beberapa argumen berikut dapat memberikan penjelasan dari pernyataan tersebut. *Pertama*, bahwa pengangguran yang diakibatkan oleh PHK terjadi karena perusahaan tempat bekerjanya tidak beroperasi lagi dan mereka kurang berani untuk berspekulasi lama-lama menganggur. Ketiadaan tunjangan sosial di Indonesia dan hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang tidak dapat ditunda lagi mendorong mereka segera bekerja kembali. Fenomena tersebut tampak sekali diperkotaan, terutama mereka yang berusaha sendiri disektor informal dengan modal dari pesangon yang ia dapat dari tempat ia bekerja. Meskipun pekerjaan informal itu ia kerjakan tanpa harus memandang apakah sesuai atau tidak dengan kemampuannya. Tampaknya realitas ini dapat dipandang sebagai pergeseran pekerja dari sektor formal kesektor informal.

Kedua akibat dari krisis ekonomi yang berimbas pada banyaknya kasus PHK menyebabkan banyak pekerja menjadi pengangguran dan tidak sedikit dari mereka pulang ke daerah asalnya (desa). Mungkin saja hal itu karena mereka kurang berani masuk dalam pekerjaan informal karena keterbatasan modal, buta akan informasi terhadap jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan uang atau takut bersaing dengan banyaknya pendatang baru sesama korban PHK. Kepulangan mereka dari kota menuju ke desa juga banyak dialami oleh kuli bangunan, mandor, pemborong bangunan dan yang terkait dengan sektor properti lainnya. Hal ini karena sektor properti merupakan yang paling parah berimbas krisis ekonomi dari pada sektor-sektor lainnya.

Beberapa kasus yang terjadi didaerah, beberapa ironi yang sebenarnya merupakan kebijakan masa lampau, ternyata berbuah dimasa-masa berikutnya. Misalnya secara ideal sebenarnya dengan bekal pendidikan tinggi sewajarnya angkatan kerja dapat menduduki sebuah pekerjaan sesuai dengan investasi yang telah dikeluarkannya, setidaknya demikian menurut teori Human Capital (Ananta,1993). Namun apa boleh buat, kenyataannya berbicara lain. Pengangguran yang berpendidikan tampaknya sudah menjadi trend dan suatu fenomena yang dapat dimaklumi pada kalangan masyarakat tertentu. Meskipun hal demikian diembel-embeli dengan kedok jual mahal, dengan alasan gaji pertama yang ditawarkan perusahaan kurang sesuai dengan investasinya.

Gambaran pengangguran terbuka pada tingkat nasional tersebut, tampaknya tidak berbeda jauh dengan fenomena pengangguran dipropinsi Jawa Timur yang nyata-nyata lebih banyak terdapat pada mereka yang berpendidikan menengah ke atas. Fenomena tersebut karena adanya keengganan mereka untuk memasuki dunia kerja yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya, ketika di Jawa Timur lebih banyak tersedia untuk mereka yang berpendidikan rendah. Ini berbeda dengan keadaan di negara-negara maju, yakni pengangguran banyak terjadi pada mereka yang berpendidikan rendah, karena makin tinggi pendidikan orang semakin rendah tingkat penganggurannya.

Data sakernas 1998 dan 2000 menunjukkan bahwa keadaan pengangguran terdidik, baik ditingkat nasional maupun ditingkat regional Jawa Timur, tidak banyak berbeda. Jenjang pendidikan SLTA masih mendominasi angka pengangguran, baik laki-laki maupun perempuan dan pada saat krisis berlangsung dan setelahnya. Sementara itu pengangguran terbuka untuk jenjang pendidikan diploma maupun sarjana, angka tersebut cukup meprihatinkan dan patut menjadi perhatian karena jumlahna relatif cukup besar yakni lebih dari 5 %.

Pengangguran Di Kota Malang

Fenomena pengangguran di kota besarpun, seperti Malang, juga menampakkan hal yang sama. Ironis sekali memang mengingat peran Kota Malang sebagai kota industri, kota pendidikan, dan kota pariwisata masih belum mampu menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduknya. Sebenarnya kalau dilihat dari komposisi penduduk yang sebagai pendatang cukup besar, karena Malang

sebagai Kota tujuan pendidikan hampir dari seluruh Jawa bahkan dari luar Jawa.

Dari data Balibang Kota (2003) telah ditemukan bahwa angka pengangguran bila dilihat dari tingkat pendidikan, angka pengangguran tersesar pada mereka yang berpendidikan SMU atau sederajat. Demikian pula menginjak pada pasca krisis, pengangguran tidak menampakkan perubahan, dimana pengangguran lebih banyak pada lulusan pendidikan menengah (70%) dan urutan kedua pendidikan tinggi / rendah (12,6 %).

Dengan demikian teori tentang Human Capital yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin tinggi pul tingkat produktivitas tenaga kerja tidak dapat menjelaskan kondisi tersebut. Hal ini disebabkan, *pertama* lapangan kerja khususnya yang modern bersifat renumeratif, sangat terbatas jumlahnya sehingga tenaga kerja terdidik yang berjumlah besar dan muncul pada waktu yang bersamaan sering tidak dapat ditampung oleh lapangan kerja formal. *Kedua*, kenyataan umum membuktikan bahwa lulusan pendidikan belum siap untuk bekerja sesuai harapan lapangan kerja. Akhirnya banyak dunia usaha industri yang masih harus melatih tenaga kerja tersebut dalam waktu yang relatif lama, agar mereka dapat bekerja. *Ketiga*, asumsi bahwa pendidikan formal mampu menyediakan tenaga terampil dan siap bekerja adalah tidak benar.

Selanjutnya sebagai dampak dari kenaikan harga BBM biaya operasional makin tinggi sehingga memicu adanya Rasionalisasi. Akibat dari PHK ini juga memicu munculnya angka pengangguran yang baru. Lalu disusul dengan mereka yang bekerja sebagai buruh / karyawan tidak tetap. Hal ini terjadi akibat ketergantungan pekerja pada perusahaan atau orang lain, sehingga apabila terjadi kekurangan aktivitas pada majikan atau perusahaan maka buruh tersebut akan kehilangan pekerjaannya. Berbeda dengan mereka yang bekerja sendiri, yang jumlahnya kecil kerena tentu saja lebih unggul dari mereka yang bekerja pada orang lain. Situasi yang demikian juga terjadi di Kota Malang.

Borjas (1996:438) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi penganggur diantaranya sebagai berikut :

1. Seseorang kehilangan pekerjaan karena perusahaan tutup (job loser).
2. Seseorang mennggalkan pekerjaan (job leavers).
3. Seseorang pencari kerja masuk ke dalam pasar tenaga kerja sesudah berada diluar sektor pasar (reentrans)
4. Seseorang pencari kerja yang baru, seperti lulusan sekolah atau perguruan tinggi (new entrans).

PEMBAHASAN

Dari berbagai ulasan di atas memang terdapat banyak faktor yang menyebabkan adanya pengangguran, meliputi faktor ekonomi, sosial, politik, dan berbagai kebijakan yang akan mempengaruhi fluktuasi pengangguran sebagai mana yang dikemukakan oleh Shryock dan Siegel. Sedangkan untuk daerah perkotaan yang nilai-nilai sosial dan gaya dan gaya hidup boros atau glamour mendorong angka pengangguran lebih tinggi, terutama bagi mereka yang sebelumnya memiliki status sosial yang cukup tinggi.

Berdasarkan lama menganggur ditinjau dari jumlah pengangguran, berbagai studi menunjukkan bahwa, mereka yang memiliki pendidikan menengah umum (SMU) akan cenderung lebih lama dari pada yang mereka pendidikanya rendah dan tinggi. Keadaan ini perlu ditafsirkan secara lebih mendalam, khususnya yang menyangkut status kredensialisme dari lulusan SMU. Gejala ini secara berangsur-angsur akan memperkuat persepsi bahwa pendidikan SMK akan digantikan oleh sistem pelatihan kerja dan pendidikan tinggi profesional. Sementara itu pendidikan tingkat SLTA akan beralih fungsi yang secara menyeluruh menjadi pendidikan semesta.

Pemerintah sendiri telah berupaya memecahkan persoalan pengangguran tersebut. Upaya atau kebijakan mengurangi angka pengangguran pada level propinsi

maupun kabupaten /kota sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah Kabupaten dengan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Dinas Pendidikan setempat merupakan bentuk kebijakan yang terintegrasi dan tersentralisasi dengan lembaga di atasnya.

Beberapa program kebijakan operasional dibidang ketenagakerjaan yang pernah dilaksanakan dan patut dilanjutkan adalah :

1. Reformasi dibidang pelatihan dan peningkatan relevansi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan kualitas pelatihan, dan peningkatan efisiensi pelatihan.
2. Pemanfaatan dan kerja sama program wirausaha baru bagi mahasiswa tingkat akhir dengan melibatkan instansi / perusahaan yang memerlukan dengan didahului tindakan identifikasi kebutuhan stakeholder.

Kebijakan untuk mengurangi pengangguran tersebut ditingkat nasional telah disiapkan empat program nasional oleh Depnakertrans yaitu : padat karya produktif, usaha mandiri, TKPMP (Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional). Disamping itu Depnakertrans bekerjasama dengan departemen terkait, merumuskan kebijakan dengan harapan kebijakan ini mampu menyerap pengangguran dalam jumlah yang besar. Dan yang lebih penting sekarang masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan lapangan kerja baru dari pada menunggu kebijakan pemerintah yang belum tentu berhasil dilaksanakan.

KESIMPULAN

Dari gambaran angka pengangguran baik secara nasional maupun data yang ada di kota-kota besar, tampaknya hal ini masih menjadi masalah yang serius yang harus kita tangani bersama-sama. Dari data yang ada terutama dari paparan Badan Pusat Statistik angka pengangguran bila dilihat dari komposisinya terbesar pada tingkat pendidikan SLTA. Urutan kedua pada mereka yang berpendidikan tinggi dan rendah. Keadaan yang demikian dialami oleh sebagian kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Malang.

Melihat data yang ada ternyata kota Malang sebagai kota industri, kota pariwisata dan kota pendidikan, ternyata angka penganggurannya juga tinggi. Hal ini tentunya perlu disikapi bagi para pencari kerja baru agar bias tahu peta ketersediaan lapangan kerja yang masih ada terutama di Kota Malang.

Sebenarnya sudah banyak strategi yang ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan menggalakkan proyek padat karya dan berusaha menselaraskan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Satu kebijakan lagi yaitu dengan digalakkannya pembentukan jiwa dan calon wirausahawan baru dikalangan mahasiswa terutama yang akan lulus dari perguruan tinggi.

Satu hal lagi dikalangan akademisi lebih digalakkan penyempurnaan kurikulum yang berbasis kompetensi, sehingga lulusan sarjana kita bukan hanya siap mencari kerja, tapi siap untuk membuka lapangan kerja sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2001. Hasil Sensus Penduduk 2000. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2001. Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia. Agustus 2001. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2001. Malang Dalam Angka. Pebruari. 2001. Malang

Badan Pusat Statistik. 2002. Malang Dalam Angka, Maret. 2002. Malang

- Badan Pusat Statistik, 2003. Malang Dalam Angka, Pebruari, 2003. Malang.
- Bisnis dan Investasi. Mengikis Pengangguran, Jangan Tunggu Belas Kasihan Investor.
Internet Webside: www.kompas.com. Januari 2004
- Botjas, George J, 1996. Labor Economics. Second Edition. The Mc Graw Hill Companies, Inc. Singapura.
- Efendi, Tadjudin N. 2003. Krisis, Realitas Pengangguran dan Beberapa Implikasi : Telaah Data Sekunder. Makalah disampaikan dalam Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia XV, Batu. Malang.
- Laporan Akhir, 2003. Penelitian Terhadap Pemanfaatan Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Sektor Kota. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Malang.
- Muhammad, Mar'i. 2003. Ledakan Pengangguran. Koran Tempo 25 Agustus, 2003.
- Yustike, Ahmad Erani. 2003. Perekonomian Indonesia, Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan.
-